

Menyoal Pilihan Politik Santri Studi kasus Ponpes Al Munawwir Krapyak Bantul

Imam Sumantri^{1*}

¹Komunitas Belajar Menulis, 55252 Wirobrajan – Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia

Submit Artikel:

Received: Jan 23rd, 2020

Revised: Jan 29th, 2020

Accepted: Jan 30th, 2020

Kata Kunci:

Pilihan Politik;

Tradisi Pesantren;

Santri;

Koresponden:

Imam Sumantri,

Komunitas Belajar Menulis
Yogyakarta

Email:

Imamfoz@gmail.com

How to Cite:

Sumantri, Imam. 2020. Menyoal Pilihan Politik Santri Studi kasus Ponpes Al Munawwir Krapyak Bantul. *Journal of Political Issues* 1(2), 134-142. Doi: <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.17>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.17>

Lisensi:



Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International
(CC BY-NC-SA 4.0)



ABSTRACT

Abstract In the pesantren tradition the pattern of interaction between the kyai and the santri is very sacred. Culture of obedience and *reverence* in the pesantren environment is automatically attached to every santri. For students, this obedience is an honor to get blessings from the ulema. This paper aims to explore the paradigm shift of santri in determining political choices in the electoral process. This research is a descriptive study with qualitative methods. Determination of informants using techniques *purposive* to adjust data needs for research purposes. The results showed a paradigm shift that used to be very dependent on *wasilah*, now is more open in person. Santri's knowledge of good political science and concern about politics are the main factors in being able to formulate personal political choices without any intervention from the pesantren.

Abstrak Di dalam tradisi pesantren pola interaksi antara kyai dan santri sangat sakral. Budaya patuh dan *takzim* di lingkungan pesantren secara otomatis melekat kepada setiap santri. Bagi santri sikap patuh tersebut merupakan penghormatan untuk memperoleh berkah dari ulama. Tulisan ini bertujuan mengupas pergeseran paradigma santri dalam menentukan pilihan politik dalam proses pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive* dengan menyesuaikan kebutuhan data untuk kepentingan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan terjadi pergeseran paradigma yang dahulu sangat bergantung kepada *wasilah* kini lebih terbuka secara personal. Pengetahuan santri tentang ilmu politik yang baik dan kepedulian tentang politik menjadi faktor utama untuk dapat merumuskan pilihan politik pribadi tanpa ada intervensi dari pihak pesantren.

Tentang Penulis:

Imam Sumantri Ms, menyelesaikan studi Magister (S2) di Universitas Gadjah Mada. Saat ini penulis adalah anggota komunitas belajar menulis (KBM) Jogja. Penulis pernah aktif magang di institute Dian Interfidei yang fokus dalam advokasi hak-hak multikultur.

PENDAHULUAN

Berkembangnya demokrasi di Indonesia secara otomatis akan berimplikasi pada semua sektor termasuk masyarakat pesantren. Pesantren sebagai suatu lembaga yang cukup unik dengan budaya pesantren yang luhur mampu mempertahankan kemurnian budayanya ditengah perkembangan zaman saat ini. Pada konteks politik, masyarakat pesantren tidak bisa lepas dari dinamika politik khususnya dalam menentukan pilihan-pilihan politiknya.

Sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia, pesantren menjadi magnet tersendiri dalam kanca politik Indonesia. Sejak era kolonial pesantren memiliki andil yang besar dalam mewujudkan kemerdekaan. Wajar hingga saat ini pesantren selalu menjadi kajian menarik dalam melihat eskalasi politik yang berkembang.

Para sarjana sudah sangat menyadari bahwa pesantren memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk dan memelihara kehidupan sosial, politik, dan keagamaan orang Jawa pedesaan (Dhofier Z. , 2011). Hal ini disebabkan pesantren dalam masyarakat Jawa sudah memiliki histori yang sangat panjang, bahkan sejak awal kedatangan Maulana Malik Ibrahim ketika awal penyebaran Islam di Indonesia. Pesantren pun dimulai dari pedesaan dengan memberikan pengetahuan agama kepada para santri oleh sang kyai.

Pesantren menurut Dr. Soebardi dalam *the place of Islam*, mengatakan bahwa kunci dalam membentuk watak masyarakat Jawa tentang Islam dan penyebaran Islam di tanah Jawa adalah pesantren. Dengan demikian, pesantren memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat Islam di Jawa (Dhofier Z. , 2011).

Perkembangan modernisasi proses pendidikan, pesantren yang pada awalnya menganut sistem individual yang kepemimpinannya berada di tangan kyai, kini mulai masuk unsur-unsur baru seperti sekolah, madrasah yang menganut sistem yang lebih demokratis dan rasional. Organisasi dapat menggantikan peranan kiai sebagai pemegang hak tunggal dalam penafsiran ajaran Islam (Mul Khan, 1992). Oleh karena itu, dalam kehidupan kaum santri, masih terdapat banyak anggapan bahwa dalam berpolitik masih sangat didasarkan pada pandangan kaum elit keagamaan, dalam hal ini yang dimaksud adalah pimpinan pesantren atau kiai yang menjadi tokoh dan pemimpin pesantren.

Seiring perkembangan zaman, pesantren sebagai lembaga keagamaan yang dahulunya dikenal tradisonal kini sebagian telah bertransformasi menjadi sebuah lembaga pesantren modern. Dengan menjadikan pendidikan umum dan keagamaan menjadi satu. Hal ini muncul sejak adanya pesantren modern Gontor yang sudah termasuk kategori pesantren modern (Dhofier Z. , 2005). Meskipun demikian, kebudayaan pesantren yang khas tetap dipertahankan sebagai identitas budaya pesantren yang terus terjaga.

Indonesia sebagai Negara mayoritas penduduknya memeluk agama Islam tidak bisa lepas dari andil pesantren termasuk eskalasi politik yang berkembang hingga saat ini. Sejak reformasi, dengan perubahan transisi sistem menuju lebih demokratis juga tidak lepas memberikan implikasi pada kebudayaan pesantren. Dengan system yang lebih terbuka dapat memberi ruang yang lebih luas kepada setiap warga Negara dalam menentukan pilihan politik termasuk di kalangan para santri pesantren.

Di lingkungan pesantren terdapat budaya yang sangat khas seperti sikap *takzim* kepada kyai atau pimpinan pesantren. Bahkan, terkadang budaya ini tidak hanya berlaku dikalangan santri pesantren tetapi juga masyarakat penduduk di sekitar pesantren. Sikap tunduk, patuh terhadap kyai ini telah sejak lama menjadi budaya khas pesantren. Salah satu yang menguatkan budaya ini adalah di pesantren diajarkan suatu kitab tentang adab seorang murid kepada guru yang lebih dikenal dengan kitab *ta'allimul muta'allim*. Kitab tersebut sangat familiar di kalangan santri sebagai panduan adab seorang murid kepada gurunya dalam hal ini kyai di pesantren.

Selain itu, posisi kyai sebagai pimpinan pesantren dianggap memiliki kharisma tersendiri. Adab tunduk kepada kyai diyakini memberikan berkah kepada para santri pesantren. Figur kyai pesantren dijadikan sebagai *uswatun hasanah* atau teladan yang baik

oleh para santri, sehingga proses interaksi antara kyai dan santri akan melahirkan sikap imitasi yang dilakukan santri terhadap adab perangai kyai. Keteladanan para santri pun belum cukup, kyai dianggap sebagai figur ideal pewaris para ulama sehingga santri perlu melakukan indentifikasi untuk menyambung silsilah keilmuan di pesantren (Rahardjo, 1988).

Hal tersebut menyebabkan kentalnya sikap patuh pada budaya pesantren yang telah berlangsung sangat lama di kalangan santri. Sikap patuh tersebut tidak jarang mencakup pada segala aspek kehidupan para santri termasuk pada aspek pilihan politik santri. Sikap politik kyai dapat dianggap sebagai pilihan yang paling arif bagi masyarakat. Figur ideal kyai dianggap lebih mampu dan dapat memberikan keputusan yang terbaik bagi masyarakat dan pesantren khususnya.

Oleh karena itu, tidak sedikit kalangan santri maupun dari masyarakat mengikuti dan patuh terhadap apa yang menjadi keputusan kyai. Termasuk dalam hal mengambil keputusan politik dalam memilih calon pemimpin baik Presiden, kepala daerah hingga para calon legislatif di tingkat pusat dan daerah. Sehingga, tidak sedikit pula para elite politik yang melakukan *sowan* sebagai cara mereka meminta restu untuk mengikuti kontestasi politik. Cara tersebut dinilai lebih efektif untuk menadapatkan dukungan politik dari seorang pimpinan pesantren atau kyai.

Kepentingan politik pesantren sangat terbatas pada *religius power* atau legitimasi kekuasaan keagamaan (Dhofier Z. , 2011), terdapat kepentingan politik juga yang dimiliki pesantren sehingga harus terlibat dalam kegiatan politik, pengembangan Islam di masyarakat sangat penting untuk menjadi tujuan utama agar Islam dapat tetap lestari di dalam kehidupan bermasyarakat.

Oleh karena itu, dibutuhkan paradigma baru bagi para santri dalam melihat fenomena politik yang terjadi, dengan melakukan studi lebih lanjut pada penelitian ini diharapkan agar dapat melihat persepsi santri dalam berpartisipasi politik dalam pemilu, sehingga para santri yang juga memiliki hak sebagai warga negara yang akan memberikan suara pada pemilu dapat berjalan dengan baik, dan sikap partisipasi politik yang aktif akan sangat membantu dalam mewujudkan sistem politik yang baik karena adanya sikap tidak acuh terhadap sistem politik.

Pada konteks penelitian ini, berusaha mengkaji pilihan-pilihan politik para santri pondok pesantren Al-Munawwir Krapyak Bantul. Pemilihan lokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sangat menarik sebagai sentra pendidikan atau dikenal sebagai Kota pelajar. Sehingga, dapat dikatakan mayoritas santri merupakan pelajar dan bahkan berstatus sebagai mahasiswa di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di DIY.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive* dengan menyesuaikan kebutuhan data untuk kepentingan penelitian. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan penyajian data dengan melakukan reduksi data dan display data.

PEMBAHASAN

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru, konstelasi politik nasional berubah sangat signifikan. Dinamika politik cenderung lebih menjadi terbuka dan lebih demokratis. Salah satu implikasinya adalah lahirnya berbagai macam partai politik baru di Indonesia termasuk partai politik yang berbasis Islam. Seperti misalnya Nadhatul Ulama menciptakan sekoci baru dalam bentuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Munculnya para pemain baru tersebut menunjukkan semangat reformasi yang aktif dan melahirkan semangat islamisme dalam ikut andil pada pemerintahan di era reformasi.

Kemunculan partai-partai Islam baru pasca reformasi diharapkan memberikan semangat baru bagi umat Islam. Termasuk antusiasme yang positif dari umat termasuk para

santri. Terlebih, mayoritas kader yang berkecimpung di partai politik yang berbasis Islam adalah berasal dari kalangan santri atau pesantren. Hal ini tentu menjadi atensi bagi masyarakat pesantren sebagai seluran atau wadah yang aspiratif bagi kemajuan bersama.

Faktanya, seiring dengan perkembangan zaman partai politik mengalami *distrust* yang cukup signifikan. Fenomena ini tidak hanya berlaku pada partai politik non Islam, akan tetapi juga partai politik yang berbasis Islam juga mengalami penurunan kepercayaan publik. Hal ini menjadi pukulan telak bagi parpol sebagai wadah aspiratif yang tidak dipercaya lagi oleh publik.

Fenomena ini juga sampai di kalangan para santri, secara umum kepercayaan kepada parpol yang berbasis Islam menurun. Selain itu, persoalan lain muncul yakni tidak adanya figur dari parpol Islam yang dinilai baik untuk mendapatkan kembali simpati masyarakat maupun santri. Krisis kepercayaan dan sosok figur parpol ini lah yang menjadikan santri cukup sulit dalam menentukan pilihan politiknya.

Hal yang menarik yang dapat menjadi fakta terhadap penurunan kepercayaan masyarakat terhadap parpol berbasis Islam adalah ketika belum pernah sekalipun parpol yang berbasis Islam tersebut memenangkan pemilu ditengah jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam ini. Sehingga hal ini menegaskan bahwa faktor agama bisa saja tidak menjadi faktor utama dalam memilihnya seseorang khususnya dalam pilihan-pilihan politik berkaitan dengan pemimpin publik.

Para santri di pondok pesantren Al Munawwir Krapyak pun memiliki pandangan yang sama bahwa keberadaan partai politik yang berbasis Islam belum bisa mewakili aspirasi umat Islam seutuhnya. Rendahnya kepercayaan masyarakat membuat partai politik harus melakukan introspeksi internal yang serius guna memperbaiki kekurangan yang terjadi pada parpol.

Krisis tersebut membuat citra partai politik Islam tidak begitu memiliki eksistensi yang baik sekalipun di kalangan masyarakat pesantren. Hal ini menjadi koreksi sebagaimana salah satu tujuan politik Islam kontemporer yang mensyaratkan kehadiran partai politik Islam yang didominasi oleh personalia yang berlatar belakang Islam kuat dalam hal ini santri serta pengambilan keputusan yang cenderung memihak kepada kepentingan umat Islam (Azra, 2000).

A. Pengaruh Kyai Dalam Politik

Di dalam tradisi pesantren pola interaksi antara kyai dan santri tentu sangat sakral. Budaya patuh dan *takzim* yang melekat di lingkungan pesantren secara otomatis melekat kepada setiap santri yang *mondok* di pesantren. Sikap tunduk patuh seorang santri tidak lepas dari ajaran adab terhadap guru melalui kitab *ta'allimul muta'allim* yang diajarkan di semua pesantren di Jawa.

Elemen-elemen dasar sebuah pesantren tidak lepas dari lima hal yakni, pondok, masjid, santri, pengajaran kitab klasik dan kiai. Dengan demikian, suatu lembaga pengajaran yang telah memenuhi kelima hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai (Dhofier Z. , 2011).

Pertama, pondok adalah merupakan tempat mukim atau asrama yang menjadi tempat tinggal para santri yang mukim di pesantren. Pondok para santri ini terletak di lingkungan pesantren itu sendiri sehingga para santri lebih mudah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pondok.

Pondok tempat tinggal para santri merupakan elemen paling penting dalam tradisi pesantren, hal tersebut akan menopang perkembangan pesantren meskipun keadaan pondok sangat sederhana. Dan hal itu akan mempermudah para santri yang datang dari berbagai daerah untuk mendapatkan tempat tinggal yang baru (Dhofier Z. , 2011).

Kedua, masjid merupakan elemen yang tidak kalah penting di sebuah pesantren. Masjid dapat berfungsi sebagai sarana yang tepat untuk mendidik santri, terutama berkaitan dengan ibadah dan pengkajian kitab-kitab Islam klasik kepada para santri (Dhofier

2011). Masjid sebagai tempat yang bukan hanya sebagai pusat ibadah akan tetapi juga sebagai tempat berbagi ilmu atau menuntut ilmu. Masjid sebagai rumah ibadah dapat berfungsi lebih banyak lagi demi menghasilkan manfaat bagi umat atau santri yang ada di pesantren. Seorang kyai yang akan mendirikan sebuah pesantren biasanya memulai dengan membangun sebuah masjid terlebih dahulu. Langkah ini biasanya diambil atas perintah gurunya yang telah menilai dirinya akan mampu memimpin sebuah pesantren (Dhofier Z. , 2011).

Ketiga, pengajaran kitab-kitab klasik terutama karangan-karangan faham syafi'i merupakan satu-satunya pengajaran formal yang diberikan oleh lingkungan pesantren. Tujuan utamanya adalah untuk mendidik calon-calon ulama, para santri yang ingin menjadi ulama biasanya akan mengembangkan keahliannya di bidang bahasa Arab. Kemudian setelah itu baru akan dididik di pesantren (Dhofier Z. , 2011).

Keempat, santri sendiri adalah murid-murid yang tinggal di lingkungan pesantren. Santri sendiri terbagi menjadi dua tipe, yakni santri mukim dan santri kalong. Santri mukim adalah santri yang menetap dalam kelompok pesantren sedangkan santri kalong adalah santri yang bolak-balik atau *nglajudan* biasanya berasal dari desa-desa di sekitar pondom pesantren (Dhofier Z. , 2011).

Kelima, kiai merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren. Bahkan kiai lah yang seringkali merupakan pendiri pondok pesantren. Sudah hal yang wajar jika perkembangan suatu pesantren akan bergantung pada kemampuan pribadi kiainya. Kebanyakan para kiai beranggapan bahwa pesantren ibarat sebuah kerajaan kecil di mana kiai memiliki *power and authority* atau kekuasaan dan kewenangan dalam kehidupan dan lingkungan pesantren (Dhofier Z. , 2011).

Santri dalam kebudayaan pesantren, juga memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu, santri memberikan penghormatan yang berlebihan kepada kiainya. Kebiasaan ini bisa menjadikan santri bersikap pasif karena khawatir kehilangan barokah, dan sikap khas santri ini yang membedakan santri dengan siswa-siswi di lembaga lainnya (Qomar, 2007).

Sikap hormat dan patuh kepada kyai yang ada di pesantren sejatinya bukanlah penyerahan secara total kepada kyai sebagai guru yang memiliki otoritas, melainkan adanya keyakinan bahwa guru sebagai penyalur berkah Tuhan kepada murid-muridnya (Karim, 1995). Sehingga, kedudukan kyai di pesantren akan sangat tinggi dan dihormati oleh para santri dan bahkan masyarakat sekitar pesantren.

Figur kyai yang sangat tinggi membuat pendapatnya sering dijadikan rujukan oleh masyarakat di sekitarnya dalam konteks apapun. Oleh karena itu, kyai dituntut tidak hanya mengetahui persoalan-persoalan agama saja akan tetapi juga persoalan umum di luar konteks agama yang menyangkut kehidupan masyarakat sekitar.

Kyai pada lingkungan tertentu seperti di pesantren merupakan elite, bahkan Kuntowijoyo mengatakan kyai merupakan elite desa yang secara khusus menangani persoalan atau urusan keagamaan (Kuntowijoyo, 2002). Figur kyai dapat dikatakan menjadi sosok sentral karena tidak hanya menjadi panutan para santrinya akan tetapi juga sampai pada lapisan masyarakat di sekitar pesantren.

Dengan status sosial yang tinggi dan sebagai simbol keagamaan yang melekat sebagai seorang ulama pewaris para nabi dan pewaris keilmuan para ulama terdahulu, para kyai memiliki legitimasi yang kuat sebagai tokoh elite dan memiliki citra yang ideal baik di lingkungan pesantren maupun masyarakat lebih luas (Rahardjo, 1988). Hal tersebut cukup membuat posisi para kyai sebagai elite memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam penentuan arah kebijakan pesantren termasuk dalam konteks kebijakan politik pesantren.

Gambar 1. Pola Hirarki Pesantren



Oleh karena itu, pesantren sering diibaratkan sebuah kerajaan kecil. Kyai sebagai pemegang otoritas merupakan sumber kekuasaan dan kewenangan mutlak di lingkungan pesantren (Dhofier Z. , 1982). Dengan kekuasaannya tersebut para kyai sebagai elite dapat membangun jaringan yang harmonis dengan para elite di luar lingkup pesantren.

Salah satu wadah bagi para kyai adalah melalui organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU). Meskipun NU tidak merupakan organisasi yang ikut berpolitik praktis, akan tetapi kebesaran organisasi NU memiliki afiliasi dengan berbagai kelompok atau organisasi yang ikut dalam politik praktis seperti partai politik. Keakraban NU dengan politik sebenarnya sudah terjadi sejak lama, pilihan politik warga NU justru terpecah-pecah seperti ke PPP atau PKB. Bahkan, sebagian lainnya memilih untuk mengafiliasikan diri dengan partai yang berbasis non Islam melainkan nasionalis.

Jika menilik sekilas sejarah politik NU maka tidak lepas dengan dibentuknya PPP sebagai parpol yang berbasis Islam dan NU hingga terjadi perpecahan suara. Perubahan haluan politik NU yang tidak berpolitik praktis baru terjadi pasca dirumuskannya *khittah* pada mukamatar NU tahun 1984. Hasil mukatamar tersebut melahirkan dua hal penting *pertama*, penegasan bahwa dimensi baru gerakan politik NU yang tidak lagi bermuatan politik praktis dan kelembagaan. *Kedua*, tentang penegasan sikap NU yang netral terhadap setiap organisasi politik (Karim, 1995).

Implikasi sikap netral NU disini adalah dengan melepas afiliasinya dengan PPP saat itu sebagai bentuk kepatuhan hasil muktamar. Sejak saat itu konflik sesama warga NU dalam politik sangat dinamis, sehingga perpecahan suara NU tidak dapat dihindarkan. Setelah reformasi Indonesia kebanjiran dengan munculnya partai-partai politik baru termasuk partai politik Islam. NU setelah reformasi membuat sekoci dalam bentuk partai politik yang dikenal dengan nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Afiliasi NU dan PKB terjalin sangat kental dengan banyaknya kader NU dan pesantren yang ikut dalam menggerakkan partai politik tersebut. Dengan demikian, posisi kyai pesantren sebagai elite keagamaan akan semakin kuat dengan adanya afiliasi dengan NU dan partai politik yang memiliki nilai tawar dikalangan elite politik lainnya. Peran sebagai kyai dan figure ideal akan menjadikan kyai sebagai tokoh panutan para pelaku politik atau kader partai yang notabene sebagian besar adalah dari kaum santri.

Fenomena *sowan* politik yang dilakukan oleh para kandidat calon pejabat publik ke pesantren-pesantren sangat dapat dipahami sebagai komunikasi antar elite. Pertemuan anatara elite partai dan elite pesantren kerap kali terjadi menjelang pergelaran pemilu. Kharisma kyai yang kuat hingga saat ini masih dipercaya akan memberikan implikasi positif bagi kepentingan elektoral masing-masing kandidat.

Pilihan politik kyai tetap saja menjadi perhatian para santri dan masyarakat di sekitar pesantren. Meskipun, terkadang tidak seluruh pilihan politik kyai diikuti oleh santrinya,

namun sosok figur ideal yang ada pada kyai dianggap mewakili kepentingan umat dengan sikap kebijakannya dalam memilih pilihan politiknya. Sehingga, tidak sedikit para santri yang untuk mengikuti pilihan kyainya sebagai wujud dari rasa percaya kepada kyai untuk memilih yang terbaik untuk kemaslahatan umat.

Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika politik yang berkembang, para santri pun sudah banyak yang minat dengan persoalan-persoalan politik, bahkan tidak sedikit pula yang memilih kuliah di jurusan ilmu politik yang memberikan warna baru bagi santri khususnya dalam memilih pilihan politiknya seperti dalam proses pemilu.

B. Pergeseran Paradigma Politik Santri

Kaum santri selalu identik dengan masyarakat pesantren dan kebudayaan pesantren yang dijalankannya. Secara etimologis, memang tidak begitu jelas asal usul kemunculan dari kata “santri” itu sendiri. Ada yang mengaitkan istilah santri tersebut dengan kata melayu, *santeriyang* menurut Robson, istilah *santeri* tersebut diturunkan dari bahasa Jawa dan terkait dengan etimologi bahasa sanskerta (*sastri*) dan bahasa tamil (*sattiri*). Makna yang terkandung dari kedua bahasa itu adalah “terpelajar” (*learned*) atau juga bermakna “ulama” (*scholar*) (Ja'afar, 2008).

Dengan demikian dapat diartikan bahwa santri adalah kalangan terpelajar, di kalangan masyarakat pesantren memang santri juga berperan sebagai pelajar yang menuntut ilmu di pesantren sesuai dengan ilmu yang diberikan oleh kyai di pesantren yang berperan sebagai guru dan pembina para santri dan peranannya sebagai pimpinan non formal di kalangan masyarakat pesantren.

Hubungan kyai dan santri akan terus berlanjut meskipun santri tersebut lulus dari pesantren sebagai tempat menuntut ilmu. Hubungan yang terjalin secara terus menerus ini memberikan dampak positif tentang adab dan sikap *takzim* kepada kyai yang selalu menjadi pegangan santri ketika sudah lulus.

Konsep tersebut akan selalu dipegang oleh para santri lulusan pesantren khususnya ketika berbicara tentang konteks agama. Akan tetapi, di lingkungan pesantren terdapat banyak juga perbedaan pandangan yang berkaitan dengan hal-hal diluar wilayah keagamaan khususnya persoalan pilihan politik.

Kepatuhan santri terhadap kyai sangat erat karena bentuk relasi yang lebih khusus lebih dari sekedar antara murid dan guru. Kyai memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman kepada santrinya dan keridhaan santri ketika menerima hukuman akan memberikan berkah tersendiri bagi santri tersebut. Menanamkan sikap patuh dan *takzim* kepada kyai merupakan hal pertama yang dilakukan oleh pesantren.

Sikap hormat patuh bahkan diperluas lagi hingga menghormati para ulama terdahulu sebagai pewaris keilmuan dan ulama yang mengarang kitab yang dipelajari di pesantren. Bagi pengamat di luar hal ini tampak lebih penting dari penguasaan ilmu, akan tetapi menurut para kyai hal merupakan suatu bagian integral dari ilmu yang akan dikuasai (Bruinessen, 1999).

Di pondok pesantren Al Munawwir Krapyak Bantul, khususnya di kampus L putra terdapat berbagai macam latar belakang santri. Mulai dari tingkat pelajar hingga mahasiswa yang kuliah di PTN/PTS di Yogyakarta dan sorenya kembali *mondok* di pesantren. Mayoritas dari mahasiswa yang nyantri adalah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lengkapinya pengetahuan agama dan umum yang diperdalam secara bersamaan oleh para santri sedikit banyak merubah paradigma santri itu sendiri khususnya dalam konteks politik. Konsep *takzim* yang mereka jalankan di pesantren tetap menjadi pegangan kuat para santri dalam mengkaji ilmu agama di pesantren. Sikap hormat kepada kyai pun masih sangat dijunjung tinggi tanpa meninggalkan budaya yang ada di pesantren.

Dengan perkembangan pola kehidupan sosial santri telah mengalami suatu perubahan cara pandang yang pada awalnya kyai adalah tokoh yang tidak dapat dibantah oleh santri.

Kini hal tersebut telah beralih, santri bahkan dapat berdiskusi tentang berbagai hal dengan sang kiai (Mulkhan, 1992).

Dapat dikatakan bahwa dalam hal pandangan politik, santri pun dapat memiliki perbedaan persepsi dalam berpartisipasi politik. Selama ini yang menjadi masalah adalah fenomena partai yang berbasis keagamaan atau partai Islam yang tidak dapat meraup suara yang banyak di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam.

Para santri yang sudah memiliki hak pilih di pesantren mayoritas adalah mahasiswa dan sebagian pula masih menjadi pemilih pemula. Pendangan kyai yang menyangkut hal-hal sifatnya non keagamaan menjadidiskusi yang hangat dikalangan para santri. Terlebih lagi jika membahas persoalan politik yang memang sangat dinamis dan menarik untuk dibahas dari berbagai perspektif.

Untuk menjelaskan posisi santri dalam memberikan pendapatnya tentang bagaimana dengan persamaan dan perbedaan sikap politik dengan kyai, maka peneliti memetakan kedalam dua kategori santri. *Pertama* adalah santri partisipatif, pada kategori ini santri yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi serta pengetahuan politik yang cukup baik. Pada kategori ini santri memiliki analisa tersendiri terhadap pertimbangan pribadi yang menjadi hak politiknya. Pilihan politik kyai tidak harus menjadi hal yang selalu diikuti oleh para santri. Meskipun demikian, pendapat atau pilihan politik para kyai akan mereka hargai dan melakukan analisa terlebih dahulu tanpa menelan secara mentah-mentah.

Hal ini dapat dicontohkan pada proses pemilihan umum yang berlangsung di pesantren dan diikuti oleh para santri yang sudah memenuhi kriteria pemilih. Para santri yang melek politik dan peduli dengan politik cenderung memiliki pilihan politik sendiri yang terkadang berbeda dengan pilihan kyai. Pada saat pemilihan umum yang lalu sebagian besar santri yang sudah berstatus mahasiswa memilih untuk tidak memilih calon atau partai politik yang berbasis Islam.

Berbagai analisa tentu menjadi landasan mereka untuk menentukan pilihan politik. Salah satu alasannya adalah karena ketidakpercayaan terhadap partai politik yang bahkan berbasis Islam sekalipun dan juga kuarngnya figur yang dianggap ideal dari para kader di partai politik yang berbasis Islam tersebut. Hal ini menunjukkan ada kebebasan memilih oleh para santri tanpa mendapat tekanan sedikit pun termasuk dari pihak pesantren.

Kemudian *kedua* adalah kategori santri non-partisipatif, pada kategori ini santri mayoritas sebagai pemilih pemula pada pesta demokrasi. Selain itu, latar belakang pendidikan sebagai pelajar sekolah menengah atas tingkat akhir juga memiliki implikasi keterbatasan akses pengetahuan dan informasi untuk menganalisa pilihan politik. Sehingga, santri dalam kategori ini belum mampu melakukan pertimbangan yang matang terkait pilihan politiknya.

Pada kategori santri ini dapat dikatakan cenderung untuk berisikap patuh dan *takzim* kepada kyai meskipun dalam konteks hak pilih pada kontestasi politik. Keputusan politik kyai yang diikuti dianggap telah mewakili kepentingan seluruh warga pesantren. Berbagai pertimbangan politik yang diambil oleh kyai dianggap merupakan pertimbangan yang paling ideal oleh santri.

Kyai tercermin sebagai sosok atau tokoh yang sangat ideal dan yang paling paham dalam memberi masukan maupun pilihan politik. Sehingga apapun yang menjadi pilihan politik kyai merupakan pilihan yang terbaik juga buat para santrinya. Pendapat ini masih dipertahankan oleh sebagian kecil santri yang masih memerlukan *wasilah* kyai dari berbagai aspek kehidupan termasuk aspek politik para santri.

KESIMPULAN

Sikap patuh dan *takzim* para santri terhadap kyai merupakan salah satu budaya khas pesantren. Budaya ini memiliki adab yang sangat menghormati kyai sebagai guru dan ulama sesuai yang diajarkan dalam kitab adab guru dan murid *ta'allimul muata'llim* yang diajarkan

hampir di seluruh pesantren di pulau jawa khususnya pesantren NU. Bagi santri sikap patuh tersebut merupakan penghormatan untuk memperoleh berkah dari ulama yang disebut sebagai pewaris para nabi.

Hal tersebut menimbulkan legitimasi yang kuat bagi kyai sebagai pemegang otoritas di pesantren. Para santri akan selalu mengikuti *wasilah* para kyai yang dianggap sebagai keberkahan dan tidak terbatas pada soal keagamaan saja akan tetapi lebih luas kepada kehidupan sosial masyarakat. Pada konteks politik budaya patuh atau *takzim* masih diikuti oleh sebagian santri pesantren dewasa ini. Figur ideal sang kyai merupakan wujud representasi terbaik dalam menentukan sikap politik.

Sikap *takzim* terhadap hal-hal di luar keagamaan khususnya pada konteks politik baru terasa berbeda di kalangan santri senior. Ada pergeseran pandangan bahwa sikap *takzim* dalam konteks politik tidak selalu harus mengikuti titah kyai. Bekal pengetahuan politik yang cukup memberikan pandangan yang terkadang berbeda sesuai dengan analisa politik masing-masing. Tentu kebijakan politik kyai tetap sangat dihargai dan dijadikan bahan pertimbangan politik, akan tetapi tidak harus mutlak sama dengan pilihan politik kyai. Pilihan politik pribadi yang diyakini dapat secara bebas diekspresikan tanpa adanya intervensi dari pihak pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, A. (2000). *Islam Poitik pada Masa Pasca Suharto*. Bandung: Mizan.
- Bruinessen, M. V. (1999). *Kitab Kuning (Pesantren dan Tarekat)*. Bandung: Mizan.
- Dhofier, Z. (1982). *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3S.
- Dhofier, Z. (2005). *Tradisi Pesantren*. Bandung: Mizan.
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Ja'afar, S. (2008). *Pasang Surut Politik Kaum Sarungan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Karim, A. G. (1995). *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Kuntowijoyo. (2002). *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura*. Yogyakarta: Matabangsa.
- Mulkhan, A. M. (1992). *Runtuhnya Mitos Politik Santri*. Yogyakarta: Sipress.
- Qomar, M. (2007). *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Ideologi*. Jakarta: Erlangga.
- Rahardjo, D. (1988). *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES.